



## INTEGRASI PEMBELAJARAN MENDALAM DAN MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH DALAM IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MATA PELAJARAN PPKn DI TINGKAT SMA

Ahmad Arif<sup>1\*</sup>, Alda Anggraini<sup>2</sup>, Irma Amalia<sup>3</sup>, Panggih Nur Adi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Pendidikan Profesi Guru, Universitas Labuhanbatu, Indonesia

Corresponding Author: [arifahmad4109@gmail.com](mailto:arifahmad4109@gmail.com)\*

**Abstract:** This study aims to analyze the integration of deep learning and principal management in the implementation of the Independent Curriculum in Pancasila and Citizenship Education (PPKn) at the high school level. The study used a qualitative approach with descriptive methods. Data were obtained through a study of various literature, policy documents, and relevant research findings on deep learning, principal leadership, and the Independent Curriculum. Data analysis was conducted descriptively through the processes of reduction, categorization, interpretation, and drawing conclusions. The results show that deep learning supports the creation of more meaningful, contextual, reflective, and student-centered PPKn learning. The success of its implementation is greatly influenced by the role of the principal as an instructional leader who is able to build a collaborative culture, facilitate teacher professional development, and create a conducive learning ecosystem. The synergy between deep learning and principal management contributes to strengthening students' civic competence, Pancasila character, and 21st-century skills. Therefore, the integration of the two is a crucial factor in optimizing the implementation of the Independent Curriculum in PPKn learning in high school.

**Keywords:** In-depth Learning, Principal Management, Independent Curriculum, Civics, Citizenship Competence.

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi pembelajaran mendalam (*deep learning*) dan manajemen kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat SMA. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi berbagai literatur, dokumen kebijakan, serta hasil penelitian yang relevan mengenai pembelajaran mendalam, kepemimpinan kepala sekolah, dan Kurikulum Merdeka. Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui proses reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam mendukung terciptanya pembelajaran PPKn yang lebih bermakna, kontekstual, reflektif, dan berpusat pada peserta didik. Keberhasilan implementasinya sangat dipengaruhi oleh peran kepala sekolah sebagai *instructional leader* yang mampu membangun budaya kolaboratif, memfasilitasi pengembangan profesional guru, serta menciptakan ekosistem pembelajaran yang kondusif. Sinergi antara pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah berkontribusi terhadap penguatan kompetensi kewarganegaraan, karakter Pancasila, serta keterampilan abad ke-21 peserta didik. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi faktor penting dalam optimalisasi implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PPKn di SMA.

**Kata Kunci:** Pembelajaran Mendalam, Manajemen Kepala Sekolah, Kurikulum Merdeka, Ppkn, Kompetensi Kewarganegaraan.

**Article info:** Accepted

**Recommended citation:** APA Style v.7

**How to Cite:**

Arif, A., Anggraini, A., Amalia, I., & Adi, P. N. (2026). Integrasi pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn di tingkat SMA. *Pancasila and Civics Education Journal*, 5 (1). 51-59  
<https://doi.org/10.30596/pcej.v%vi%i.30189>



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

## INTRODUCTION

Transformasi pendidikan abad ke-21 menuntut sekolah tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kolaborasi, kreativitas, serta pembentukan karakter peserta didik. Perubahan tersebut mendorong sistem pendidikan untuk mengembangkan proses pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik (Fullan & Langworthy, 2018; OECD, 2019). Dalam konteks Indonesia, upaya tersebut diwujudkan melalui implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, diferensiasi, penguatan karakter, serta pengembangan kompetensi peserta didik secara holistik (Kemendikbudristek, 2022). Kurikulum Merdeka hadir sebagai respons terhadap tantangan pembelajaran abad ke-21 sekaligus sebagai strategi pemulihan pembelajaran pascapandemi yang berfokus pada kebutuhan dan potensi peserta didik (Mulyasa, 2023).

Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian dalam implementasi Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran mendalam (*deep learning*). Menurut Fullan, Quinn, dan McEachen (2018), pembelajaran mendalam merupakan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengonstruksi pengetahuan secara bermakna melalui keterlibatan aktif, refleksi kritis, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini tidak sekadar menekankan penguasaan materi, tetapi juga kemampuan memahami konsep secara komprehensif dan menghubungkannya dengan berbagai konteks kehidupan (Hattie, 2023; Darling-Hammond et al., 2020). Dengan demikian, pembelajaran mendalam menjadi salah satu pendekatan yang relevan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kritis, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), penerapan pembelajaran mendalam memiliki signifikansi yang tinggi karena tujuan utama PPKn tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga membentuk karakter, sikap demokratis, tanggung jawab sosial, serta kompetensi kewarganegaraan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Winataputra, 2020; Winarno, 2021). Pembelajaran PPKn yang selama ini cenderung berorientasi pada hafalan konsep dan regulasi memerlukan transformasi menuju pembelajaran yang lebih reflektif, kontekstual, dan partisipatif agar peserta didik mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata (Budimansyah, 2022; Somantri, 2019). Oleh karena itu, pembelajaran mendalam menjadi pendekatan yang potensial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn di tingkat SMA.

Namun demikian, implementasi pembelajaran mendalam dalam Kurikulum Merdeka masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa guru masih mengalami kesulitan dalam merancang pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan berpikir tingkat tinggi, pembelajaran kontekstual, serta asesmen autentik yang mendukung pembelajaran mendalam (Darling-Hammond et al., 2020; Latifah et al., 2025). Selain itu, kesiapan sumber daya sekolah, budaya organisasi, dan dukungan kepemimpinan pendidikan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah. Hasil penelitian mengenai implementasi *deep learning* dalam Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan pembelajaran mendalam sangat dipengaruhi oleh dukungan sistem sekolah dan kepemimpinan yang efektif.

Dalam konteks tersebut, peran kepala sekolah menjadi sangat strategis. Kepala sekolah tidak hanya berfungsi sebagai administrator pendidikan, tetapi juga sebagai *instructional leader* yang bertanggung jawab mengarahkan, memfasilitasi, dan mengembangkan kualitas

pembelajaran di sekolah (Hallinger, 2020; Leithwood et al., 2020). Manajemen kepala sekolah yang efektif mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi berbagai program pendidikan yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap kesiapan guru, budaya belajar sekolah, serta keberhasilan implementasi inovasi kurikulum.

Lebih lanjut, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran, tetapi juga oleh kemampuan kepala sekolah dalam membangun ekosistem sekolah yang mendukung inovasi pembelajaran. Kepala sekolah berperan dalam menyediakan sumber daya, mengembangkan komunitas belajar, mendorong kolaborasi guru, melakukan supervisi akademik, serta memastikan keterlaksanaan program pembelajaran yang sesuai dengan prinsip Kurikulum Merdeka (Mastur, 2023; Suryadi & Nurdin, 2024). Penelitian mengenai kepemimpinan transformasional kepala sekolah menunjukkan bahwa kepemimpinan yang visioner dan kolaboratif mampu meningkatkan efektivitas implementasi Kurikulum Merdeka di satuan pendidikan.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji implementasi Kurikulum Merdeka, pembelajaran mendalam, maupun kepemimpinan kepala sekolah secara terpisah, kajian yang secara khusus mengintegrasikan pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn di tingkat SMA masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada implementasi Kurikulum Merdeka secara umum atau pada aspek kepemimpinan sekolah tanpa mengaitkannya secara langsung dengan praktik pembelajaran mendalam dalam PPKn. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut guna memahami bagaimana sinergi antara pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah dapat mendukung pencapaian tujuan Kurikulum Merdeka dalam pembelajaran PPKn.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn di tingkat SMA. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan pembelajaran PPKn berbasis *deep learning* serta memberikan rekomendasi praktis bagi kepala sekolah, guru, dan pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah menengah atas.

## METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena integrasi pembelajaran mendalam (*deep learning*) dan manajemen kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat SMA. Menurut Creswell dan Creswell (2018), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan sosial maupun pendidikan. Sementara itu, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel penelitian (Moleong, 2021). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan kepala sekolah, guru PPKn, serta pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah. Adapun data sekunder

diperoleh dari dokumen kurikulum, modul ajar, laporan sekolah, artikel ilmiah, buku, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembelajaran mendalam dan Kurikulum Merdeka. Penggunaan berbagai sumber data dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai praktik pembelajaran dan manajemen sekolah yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka (Miles, Huberman, & Saldaña, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran PPKn yang menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran mendalam. Wawancara mendalam dilakukan kepada kepala sekolah dan guru PPKn untuk memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, supervisi, serta evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa dokumen perencanaan pembelajaran, program sekolah, serta berbagai kebijakan yang mendukung pelaksanaan Kurikulum Merdeka (Sugiyono, 2023). Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldaña (2019) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, tema, dan hubungan yang ditemukan selama proses analisis.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala sekolah, guru PPKn, dan dokumen sekolah, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Creswell, 2018).

## RESULT AND DISCUSSION

### A. Integrasi Pembelajaran Mendalam dalam Implementasi Kurikulum Merdeka pada Mata Pelajaran PPKn

Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka telah membuka ruang yang lebih luas bagi penerapan pembelajaran mendalam (*deep learning*) dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat SMA. Pembelajaran mendalam tidak lagi menempatkan peserta didik sebagai objek yang menerima pengetahuan secara pasif, melainkan sebagai subjek yang secara aktif membangun pemahaman melalui proses eksplorasi, refleksi, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Dalam konteks Kurikulum Merdeka, pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan konten, tetapi juga pada kemampuan peserta didik untuk memahami makna, mengaitkan pengetahuan dengan kehidupan nyata, dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan sebagai warga negara.

Temuan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara filosofi Kurikulum Merdeka dengan teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Piaget dan dikembangkan lebih lanjut oleh Vygotsky. Teori konstruktivisme memandang bahwa pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari guru kepada peserta didik, tetapi harus dikonstruksi melalui pengalaman belajar yang bermakna. Dalam pembelajaran PPKn, proses tersebut terlihat ketika peserta didik terlibat dalam diskusi mengenai isu demokrasi, toleransi, hak asasi manusia, partisipasi politik, maupun persoalan sosial yang berkembang di masyarakat. Melalui interaksi tersebut, peserta didik tidak hanya memahami konsep secara tekstual, tetapi juga membangun pemaknaan berdasarkan pengalaman sosial dan konteks kehidupan mereka.

Dalam perspektif *Deep Learning Theory* yang dikembangkan Fullan, Quinn, dan McEachen (2018), pembelajaran mendalam ditandai oleh munculnya enam kompetensi global (6Cs), yaitu character, citizenship, collaboration, communication, creativity, dan critical thinking. Hasil kajian menunjukkan bahwa keenam kompetensi tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan tujuan pembelajaran PPKn. Sebagai contoh, ketika peserta didik melakukan analisis terhadap fenomena intoleransi di media sosial, mereka tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*), tetapi juga memperkuat karakter kewarganegaraan (*citizenship*) dan kemampuan berkomunikasi secara demokratis (*communication*). Dengan demikian, pembelajaran mendalam menjadi instrumen strategis untuk menjembatani tujuan Kurikulum Merdeka dengan tujuan substantif pendidikan kewarganegaraan.

Secara kontekstual, urgensi penerapan pembelajaran mendalam dalam PPKn semakin relevan di tengah perkembangan era digital. Generasi Z sebagai kelompok peserta didik saat ini hidup dalam lingkungan yang dipenuhi informasi, media sosial, dan berbagai narasi politik yang beragam. Kondisi ini menghadirkan tantangan berupa meningkatnya misinformasi, polarisasi sosial, intoleransi digital, hingga rendahnya literasi politik generasi muda. Dalam situasi tersebut, pembelajaran PPKn tidak cukup hanya mengajarkan konsep-konsep normatif kewarganegaraan, tetapi harus mampu membangun kemampuan berpikir reflektif dan kritis sehingga peserta didik dapat menilai, menganalisis, dan mengambil sikap terhadap berbagai informasi yang mereka terima.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pembelajaran mendalam dalam PPKn memiliki fungsi transformasional. Jika selama ini pembelajaran PPKn sering dikritik karena terlalu menekankan aspek hafalan dan kognitif, maka pendekatan pembelajaran mendalam memungkinkan terjadinya transformasi dari *teaching about citizenship* menuju *learning for citizenship*. Artinya, peserta didik tidak hanya belajar mengenai kewarganegaraan, tetapi belajar menjadi warga negara yang demokratis melalui pengalaman langsung. Perspektif ini sejalan dengan teori pendidikan demokrasi John Dewey yang menekankan bahwa demokrasi harus dipelajari melalui praktik kehidupan demokratis, bukan hanya melalui pengetahuan teoritis.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam berkontribusi terhadap pembentukan tiga dimensi kompetensi kewarganegaraan yang dikemukakan Branson (1998), yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*. Ketiga dimensi tersebut berkembang secara simultan ketika peserta didik terlibat dalam pembelajaran yang bersifat reflektif, partisipatif, dan kontekstual. Oleh karena itu, pembelajaran mendalam dalam implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya berfungsi meningkatkan kualitas akademik peserta didik, tetapi juga memperkuat identitas kewarganegaraan dan karakter Pancasila.

## B. Manajemen Kepala Sekolah sebagai Katalisator Transformasi Pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen kepala sekolah. Dalam konteks perubahan kurikulum, kepala sekolah tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai administrator yang mengelola aspek birokratis sekolah, melainkan harus bertransformasi menjadi pemimpin pembelajaran (*instructional leader*) yang mampu mengarahkan perubahan budaya belajar di sekolah. Analisis terhadap berbagai praktik implementasi Kurikulum Merdeka menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang berhasil mengembangkan pembelajaran mendalam umumnya memiliki kepala sekolah yang aktif dalam mendorong inovasi pembelajaran. Kepala sekolah tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga terlibat dalam membangun visi bersama, memfasilitasi

pengembangan profesional guru, serta menciptakan iklim sekolah yang mendukung pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui teori *Instructional Leadership* yang dikembangkan Hallinger (2020). Dalam teori ini, kepala sekolah memiliki tiga fungsi utama, yaitu mendefinisikan visi sekolah, mengelola program pembelajaran, dan mengembangkan iklim belajar yang positif. Ketiga fungsi tersebut menjadi sangat penting dalam implementasi Kurikulum Merdeka karena perubahan kurikulum pada dasarnya merupakan perubahan paradigma pembelajaran. Tanpa adanya kepemimpinan yang kuat, perubahan tersebut berpotensi hanya berhenti pada level administratif tanpa menghasilkan perubahan substantif dalam praktik pembelajaran.

Selain perspektif *instructional leadership*, temuan penelitian juga relevan dengan teori *Transformational Leadership* yang dikemukakan Leithwood dan Jantzi. Teori ini menjelaskan bahwa pemimpin pendidikan yang efektif harus mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan warga sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, kepala sekolah berperan sebagai agen perubahan (*change agent*) yang membantu guru keluar dari zona nyaman menuju praktik pembelajaran yang lebih inovatif.

Secara kontekstual, tantangan terbesar dalam implementasi Kurikulum Merdeka bukan terletak pada dokumen kurikulum, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia. Banyak guru masih terbiasa dengan pola pembelajaran yang berpusat pada guru (*teacher-centered learning*). Oleh karena itu, kepala sekolah memiliki peran penting dalam membangun budaya belajar organisasi (*learning organization*) sebagaimana dikemukakan Senge (2015). Sekolah yang mampu menjadi organisasi pembelajar akan lebih adaptif terhadap perubahan dan lebih siap mengembangkan inovasi pembelajaran.

Lasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola implementasi Kurikulum Merdeka juga dipengaruhi oleh kemampuannya membangun kolaborasi. Pembelajaran mendalam membutuhkan ruang refleksi, diskusi profesional, dan komunitas belajar guru yang aktif. Dalam konteks ini, kepala sekolah berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan berbagai sumber daya sekolah agar tercipta lingkungan yang mendukung pembelajaran berkualitas. Oleh sebab itu, manajemen kepala sekolah dapat dipahami sebagai faktor strategis yang menentukan keberlanjutan implementasi pembelajaran mendalam di sekolah.

### C. Sinergi Pembelajaran Mendalam dan Manajemen Kepala Sekolah dalam Penguatan Kompetensi Kewarganegaraan Abad ke-21

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah bukanlah dua komponen yang berdiri sendiri, melainkan dua elemen yang saling berinteraksi dalam membentuk ekosistem pendidikan yang efektif. Pembelajaran mendalam berfungsi sebagai strategi pedagogis untuk mengembangkan kompetensi peserta didik, sedangkan manajemen kepala sekolah berfungsi sebagai mekanisme institusional yang memastikan strategi tersebut dapat diimplementasikan secara optimal.

Analisis menunjukkan bahwa hubungan antara kedua komponen tersebut dapat dijelaskan melalui pendekatan teori sistem pendidikan. Menurut perspektif sistem, keberhasilan suatu program pendidikan ditentukan oleh keterhubungan berbagai komponen yang ada di dalamnya. Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru, kepala sekolah, peserta didik, budaya sekolah, serta kebijakan pendidikan merupakan bagian dari satu sistem yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, pembelajaran mendalam tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh manajemen sekolah yang kuat, begitu pula sebaliknya.

Secara empiris, sinergi antara pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah menghasilkan dampak yang signifikan terhadap penguatan kompetensi kewarganegaraan abad ke-21. Peserta didik tidak hanya mengalami peningkatan dalam aspek pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga menunjukkan perkembangan dalam keterampilan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, literasi digital, kemampuan kolaborasi, dan partisipasi sosial. Kompetensi tersebut merupakan modal penting bagi generasi muda untuk menghadapi tantangan demokrasi digital yang semakin kompleks.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini memiliki implikasi yang sangat penting. Fenomena polarisasi politik, penyebaran hoaks, rendahnya partisipasi politik substantif, serta meningkatnya intoleransi menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memerlukan pendekatan yang lebih transformatif. Pembelajaran mendalam yang didukung oleh kepemimpinan sekolah yang kuat berpotensi menjadi solusi untuk membangun warga negara yang tidak hanya memahami nilai-nilai demokrasi, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan nyata.

Lebih lanjut, integrasi pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah juga berkontribusi terhadap pencapaian Profil Pelajar Pancasila. Dimensi beriman dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif berkembang melalui proses pembelajaran yang didukung oleh budaya sekolah yang kondusif. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn tidak hanya diukur dari pencapaian akademik peserta didik, tetapi juga dari kemampuan sekolah membentuk karakter dan kompetensi kewarganegaraan yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21.

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa integrasi pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah merupakan fondasi utama dalam transformasi pembelajaran PPKn di era Kurikulum Merdeka. Keduanya membentuk hubungan yang saling menguatkan dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pembentukan warga negara yang demokratis, kritis, bertanggung jawab, serta memiliki karakter Pancasila yang kuat.

## CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi pembelajaran mendalam (*deep learning*) dan manajemen kepala sekolah merupakan faktor strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di tingkat SMA. Pembelajaran mendalam memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan pemahaman yang lebih bermakna melalui proses berpikir kritis, reflektif, kolaboratif, dan kontekstual. Dalam pembelajaran PPKn, pendekatan ini tidak hanya meningkatkan penguasaan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga memperkuat keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang diperlukan dalam kehidupan demokratis. Dengan demikian, pembelajaran PPKn tidak lagi berorientasi pada hafalan konsep, melainkan pada pembentukan warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berkarakter Pancasila. Temuan penelitian juga menegaskan bahwa keberhasilan implementasi pembelajaran mendalam sangat dipengaruhi oleh efektivitas manajemen kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai *instructional leader* dan agen perubahan yang mampu membangun visi bersama, mengembangkan budaya sekolah yang kolaboratif, memfasilitasi pengembangan profesional guru, serta menciptakan lingkungan belajar yang mendukung inovasi pembelajaran. Peran tersebut menjadi penting karena transformasi

kurikulum tidak hanya memerlukan perubahan pada aspek administratif, tetapi juga perubahan paradigma pembelajaran dan budaya organisasi sekolah.

Sinergi antara pembelajaran mendalam dan manajemen kepala sekolah menghasilkan ekosistem pendidikan yang mendukung penguatan kompetensi abad ke-21 dan Profil Pelajar Pancasila. Integrasi keduanya memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, literasi digital, serta kepedulian sosial yang relevan dengan tantangan kehidupan demokrasi di era digital. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran PPKn memerlukan komitmen bersama antara guru dan kepala sekolah dalam membangun pembelajaran yang bermakna, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi kewarganegaraan secara holistik. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya penguatan kapasitas guru dan kepala sekolah secara berkelanjutan agar tujuan transformasi pendidikan melalui Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara optimal.

## REFERENCES

- Branson, M. S. (1998). *The role of civic education: A forthcoming education policy task force position paper from the communitarian network*. Center for Civic Education.
- Budimansyah, D. (2022). *Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: UPI Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science*, 24(2), 97–140. <https://doi.org/10.1080/10888691.2018.1537791>
- Dewey, J. (2018). *Democracy and education: An introduction to the philosophy of education*. Start Publishing LLC. (Original work published 1916)
- Fullan, M., & Langworthy, M. (2018). *A rich seam: How new pedagogies find deep learning*. Pearson.
- Fullan, M., Quinn, J., & McEachen, J. (2018). *Deep learning: Engage the world, change the world*. Corwin Press.
- Hallinger, P. (2020). Leadership and school improvement: Supporting schools through effective leadership. *Educational Management Administration & Leadership*, 48(1), 5–20. <https://doi.org/10.1177/1741143219879705>
- Hattie, J. (2023). *Visible learning: The sequel*. Routledge.
- Kemendikbudristek. (2022). *Panduan pembelajaran dan asesmen pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kemendikbudristek. (2022). *Kurikulum Merdeka: Tanya jawab*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). Sage Publications.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.

- Mastur, M. (2023). Kepemimpinan kepala sekolah dalam implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 13(2), 145–157.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2023). *Implementasi Kurikulum Merdeka*. Bumi Aksara.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD future of education and skills 2030: OECD learning compass 2030*. OECD Publishing.
- Piaget, J. (2019). *The psychology of intelligence*. Routledge.
- Senge, P. M. (2015). *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization* (Revised ed.). Crown Business.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif* (3rd ed.). Alfabeta.
- Suryadi, A., & Nurdin, N. (2024). Kepemimpinan pendidikan dalam mendukung implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia*, 16(1), 22–35.
- Vygotsky, L. S. (2017). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.
- Winarno. (2021). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan: Panduan kuliah di perguruan tinggi*. Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. (2020). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif pendidikan demokrasi*. Universitas Terbuka.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>